

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Anatami, Darwis,. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fuady, Munir , *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Hikmawati, Puteri, et.al, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen: Perbandingan Pengaturan Beberapa Negara*, Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* Surabaya: Reality Publisher 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Murhaini, Suriansyah, *Hukum Apartemen: Rumah Susun*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2021.
- Nasution, Azharuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Ronny, Hanitijo S., *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, asas, dan terori hukum kepailitan: memahami Undang-Undang no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009. <https://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono>

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

## Jurnal

Agrifa, Rexi Kilian. "Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun Dalam Perkara Kepailitan Dari Perusahaan Pengembang Rumah Susun." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2024.

Ahmad, Dian Fauzi, "Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur," *Jurnal Niara* 18, no. 3, 2025. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/niara>.

Andaru dan Sulistio Adiwianto, "Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): halaman 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4555>

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1.2, 2019.

Elysia, Denise, et al. "Tinjauan yuridis transaksi jual beli properti melalui Pre-Project selling." *Jurnal Education and Development* 8.3, 2020. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i3.1752>.

Fauzi, Dian Ahmad, "Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur," *Nommensen Journal of Private Law* 18, no. 3, 2026. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/31362/8847>.

Gunawan, Ricky Wijaya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Apartemen Atas Kenaikan IPL Secara Sepihak Oleh Pengelola." *Jurnal Minuta* 6.01, 2024.

- Hadi, Kiki Nasir, Khalimi, dan Mohamad Ismed, “Kedudukan Kreditor Separatis pada Piutang dan Jaminan Kebendaan terhadap Proses PKPU,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 11, 2022. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2861>
- Harundani, Laksmi. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang Hak Atas Tanah Bersamanya Berada di Atas Hak Pengelolaan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Hapsari, Galuh, “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Irianto, Catur. "Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.3 (2015): 399-418. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>
- Krisharyanto, Edi, and Peni Jati Setyowati. "Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 24, 2019. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.731>
- Lubis, Muhammad Rum, “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Metadata* 6, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.470>
- Meydiandra, Falah, Indri Fogar Susilowati, and Mahendra Wardhana. "Problematisasi Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun di Apartemen Metropolis Surabaya." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 4.2, 2017.
- Mungkasa, Oswar. "Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Beragam Upaya, Pembelajaran dan Rekomendasi."
- Octarina, Nynda Fatmawati dan I Nyoman Nurjaya, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, 2020.
- Pamungkas, Noto dan Hasna Salsabila Qatrunnada, “*The Effect of Liquidity, Profitability, Operating Cash Flow, and Ownership Structure on Financial Distress (Study on Property and Real Estate Companies Listed on the IDX)*”, 2023.
- Paramadani, Salsabila Putri, et.al, “Perlindungan Hukum bagi Pembeli Rumah Susun Bukan Hunian Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, 2020.

Permata, Rika Ratna, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembelian Rumah Susun,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2, 2020. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/66>

Pertiwi, Kartika Eka, Sudaryat, dan Ema Rahmawati, "Perlindungan Hukum Kreditor yang Tidak Mendaftarkan Tagihan terhadap Klausul Perjanjian Perdamaian yang Mengakibatkan Penghapusan Piutang," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6, 2025. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1332>

Prameswari, Alfani Rizky, Elisatris Gultom, dan Erna Rahmawati, "Kualifikasi Pembuktian Sederhana dalam Kasus Pailit Developer Rumah Susun Ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 3 2024. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i3.1444>

Rahmani, Illa, "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v1i1.1517>

Randithia, Irene Dwi, dan Krisnadi Nasution, “Prosedur Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4, 2024.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17 (33), 2019.

Santi, Brigita Natalia Rose dan Adi Sulistiyono, "Eksistensi Kedaulatan Kreditor Konkuren dalam Perdamaian melalui PKPU yang Berkeadilan (Studi Putusan: Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3, 2025. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5819>

Sinaga, Niru Anita, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepailitan Pengembang Properti,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2, 2019. <https://doi.org/10.30652/jih.v15i2>

Suprianto, Lambok, “Penyelesaian Kredit Bermasalah di Sektor Perumahan,” *Jurnal Cendekia Hukum*, 2021.

Vikri Pranata Alif Utama, Silva Farida Apriliandy, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, and Sudiman Sihotang. "Pembangunan Rumah Susun Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Depok Dihubungkan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun." *Karimah Tauhid* 2, no. 3, 2023.  
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i3.8381>

Yedija, Ignwer Toynbee, Yuhelson, dan Nurhakim, "Eksistensi Perdamaian dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4, 2024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14444>.

## **Internet**

Dedy Kurniadi, 18 Desember 2020, PKPU Semakin Dipercaya Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Selama Tahun 2020, [https://dedykurniadi.com/pkpu-semakin-dipercaya-sebagai-metode-penyelesaian-sengketa-selama-tahun-2020.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://dedykurniadi.com/pkpu-semakin-dipercaya-sebagai-metode-penyelesaian-sengketa-selama-tahun-2020.html?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 5 Mei 2026.

Ibrahim, Hendri, dan Aprita, "Penerapan Asas Keadilan bagi Konsumen yang Tidak Dapat Memohon Pailit dan PKPU kepada Developer Apartemen atau Rumah Susun terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2024. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1639>

Ipot News, 11 Februari 2026, PTPP Hadapi Gugatan PKPU Terkait Utang Proyek Rusun ASN 1, [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PTPP\\_Hadapi\\_Gugatan\\_PKPU\\_Terkait\\_Utang\\_Proyek\\_Rusun\\_ASN\\_1&news\\_id=213271&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=STOCK&name=&search=y\\_general&q=PTPP&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PTPP_Hadapi_Gugatan_PKPU_Terkait_Utang_Proyek_Rusun_ASN_1&news_id=213271&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=STOCK&name=&search=y_general&q=PTPP&halaman=1) diakses pada 5 Mei 2026.

## **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Bagian Hukum Perdata Khusus angka 3.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaF.Jkt.Pst.